

# **Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Pindah Partai oleh Calon Legislatif 2014 di Kabupaten Wonogiri**

Oleh: Esti Sarirani, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNDIP  
Dosen Pembimbing: Yuwanto, Ph.D, Nunik Retno H.,M.Si

## **Abstrak :**

Era reformasi telah menjanjikan ruang kebebasan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada aspek politik. Mulai dari kebebasan untuk menyampaikan opini politik hingga perilaku politik oleh politisi. Menjelang pemilihan umum legislatif 2014 di Indonesia terjadi pergolakan politik baik di tataran nasional maupun di daerah. Pergolakan politik juga terjadi di Kabupaten Wonogiri dimana terjadi fenomena aksi perpindahan partai politik oleh calon legislatif dalam memperebutkan jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri masa jabatan 2014-2019.

Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang notabene adalah pemilih dalam setiap pemilu mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan wakil rakyat yang baik. Faktanya dewasa ini masyarakat justru dihadapkan dengan perilaku-perilaku calon legislatif yang menyimpang sehingga kepercayaan dan penghargaan terhadap lembaga legislatif semakin berkurang. Fenomena berpindah-pindahnya calon legislatif dalam bursa pencalegan di Kabupaten Wonogiri melingkupi berbagai permasalahan tersebut.

Persepsi adalah output dari obek-objek atau informasi yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup memberi perhatian pada fenomena pindah partai di kalangan calon legislatif di Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonogiri sebagai responden menyatakan bahwa mereka menganggap perilaku perpindahan partai politik oleh calon legislatif adalah sesuatu yang negatif dan menganggap bahwa perilaku perpindahan partai politik didorong oleh motivasi pribadi dari masing-masing individu calon legislatif tersebut. Selain itu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai responden kepada calon legislatif pindah partai di Kabupaten Wonogiri ini berada pada tingkatan paling rendah. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi sentiment negatif dari masyarakat terhadap fenomena perpindahan calon legislatif di Kabupaten Wonogiri.

## **Abstract:**

Reformation era have been promising free and wide space in every life of the nation aspects, especially political aspect. Starting from the freedom to express political opinions to political behavior by politicians. Towards of the 2014's legislative election in Indonesia, political agitation has occurred in both the national and local levels. It also occurs in Wonogiri regency, where there is phenomenon of the moved-political-party by the legislative candidates in the case to fight the position as Wonogiri's parliament member for 2014 to 2019.

Public as the highest authority who noted as the voters in every general election has a very important role to vote the good public representatives. In fact, public now are

confronted with afield behaviors of the legislative candidates, so the trust and award for the legislature are getting lower. The phenomenon of legislative candidate's movement in exchange nomination in Wonogiri regency had completing the problems.

The goals in this thesis writing is to know how are the public perception about the moved-party's politician by the 2014's legislative candidates in Wonogiri regency. The type of research is quantitative descriptive.

Perseption is the output from objects or informations which captured by human senses. The results of this study indicate that sufficient public attention to the phenomenon of the party moved among the legislative candidates in Wonogiri. Most of the Wonogiri's public as the renpondents said that they assume this behavior is something that is negative and driven by personal motivation from each candidates. In addition, the belief that a majority of respondents to the public as the party moved legislative candidates in Wonogiri is in the lower level. It shows that there is a negative sentiment from public to the phenomenon of legislative candidate's movement in Wonogiri regency.

Keywords: public perception, legislative candidate's movement, the legislative's election.

## **Latar Belakang**

Semenjak reformasi hadir, maka masyarakat tanpa terkecuali berhak untuk melakukan kegiatan politik, termasuk menjadi anggota atau bahkan mendirikan partai politik. Dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ayat tersebut memberikan jaminan atas hak asasi politik atau *political right* bagi warga Indonesia. Hak Politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

Sejalan dengan berjalannya reformasi maka banyak hal terjadi pada perpolitikan Indonesia, hal ini terlihat dari perjalanan partai politik dalam mengikuti pemilihan umum. Selama kurun waktu pemilu tahun 1999 hingga pemilu 2004 partai-partai besar masih endominasi hasil perolehan suara. Meskipun begitu partai-partai politik baru bermunculan, misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Namun banyak diantara anggota partai baru tersebut merupakan pindahan dari partai besar yang notabene merupakan partai bentukan era orde baru. Hal ini sekiranya merupakan awal lahirnya politisi-politisi pindah partai di era reformasi.

Partai politik merupakan sumber dari lahirnya wakil-wakil rakyat yang duduk di tataran DPR-RI dan DPRD. Kinerja wakil rakyat tersebut menjadi salah satu harapan bagi masyarakat untuk merealisasikan kehidupan yang lebih sejahtera. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituntut untuk dapat menjalankan amanat reformasi dengan fungsi-fungsi yang dimiliki, seperti fungsi legislasi, anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). Dengan demikian maka demokratisasi menjadi agenda utama dan tanggung jawab partai politik melalui wakil-wakil yang telah didelegasikan.

Dalam konteks kinerja, dewasa ini badan legislatif justru menunjukkan gejala adanya disfungsi. Terdapat beberapa penyimpangan oleh anggota DPR baik DPR RI maupun DPRD dalam pelaksanaan fungsinya, seperti terlibat dalam kasus korupsi, tindak amoral, dan lain sebagainya. Selama tahun 2013 beberapa nama kader partai politik yang juga duduk sebagai anggota DPR RI tersangkut dalam kasus korupsi yang skalanya besar dan cukup menjadi catatan buruk bagi kinerja parlemen. Sedikit banyak catatan kinerja wakil DPR mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan legislatif ini.

Lahirnya politisi-politisi pindah partai bersama lahirnya era reformasi di tataran nasional melengkapi perjalanan partai politik di Indonesia. Bukan hanya di tataran nasional, namun politisi pindah partai juga bermunculan di daerah seperti halnya di Kabupaten Wonogiri. Pada pemilu legislatif di Kabupaten Wonogiri terdapat 13 nama calon legislatif (caleg) yang melakukan perilaku perpindahan partai politik. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap politisi pindah partai oleh calon legislatif 2014 di Kabupaten Wonogiri.

## **Kerangka Teori**

### **Persepsi**

Menurut Desiderato yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat<sup>1</sup> menyebutkan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi indrawi. Yang menentukan persepsi bukan stimulasi

---

<sup>1</sup> Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm 50

(sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori.

Bimo Walgito mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus.<sup>2</sup> Sedangkan Irwanto menyatakan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antargejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti.<sup>3</sup>

Kotler yang dikutip oleh Silih Agung Wasesa mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses dimana seseorang melakukan seleksi, mengorganisasi dan menginterpretasi informasi-informasi yang masuk ke dalam pikirannya menjadi sebuah gambar besar yang memiliki arti. Persepsi tidak bergantung pada stimulasi fisik saja, tapi juga terhadap stimulasi lain yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang dimiliki seseorang secara pribadi.<sup>4</sup> Pendapat lain mengatakan persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenainya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.<sup>5</sup> Lahlry dalam Werner menyatakan bahwa “ Persepsi didefinisikan sebagai proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data-data sensoris. Data sensoris sampai kepada kita melalui lima indra kita.....”<sup>6</sup> Sedangkan Menurut Winaryo persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm 88

<sup>3</sup> Irwanto, *Psikologi Umum*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002, hlm 71

<sup>4</sup> Wasesa, Silih Agung, *Strategi Public Relations*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006, hlm 13

<sup>5</sup> Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, 1987, hlm 46

<sup>6</sup> Severin, Werner J & James W. Tankard Jr. *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 83

<sup>7</sup> Winaryo, *Self Empowerment, Persepsi, Paradigma dan Motivasi Salesman*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 14

Menurut Jalaluddin Rakhmat faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain <sup>8</sup>:

1. Perhatian (*attention*)
2. Faktor Fungsional
3. Faktor Struktural

Menurut Kotler yang dikutip oleh Silih Agung Wasesa <sup>9</sup>, ada tiga proses seleksi ketika seseorang akan mempersepsikan sesuatu:

- a. *Selective attention*, yaitu dimana seseorang akan mempersepsikan perhatiannya.
- b. *Selective distortion*, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilah-milah informasi
- c. *Selective retention*, yaitu dimana seseorang akan mudah mengingat informasi yang dilakukan secara berulang-ulang.

### **Model Perilaku Politik**

Menurut Almond dan Powell yang dikutip oleh Efriza<sup>10</sup> disebutkan bahwa “ secara bebas perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik”.

Sedangkan Miriam Budiardjo dalam Cholisin dkk<sup>11</sup>, menyatakan bahwa dalam pendekatan ini yang menjadi fokus perhatian adalah perilaku perorangan, juga kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi, kelompok elit, gerakan massal atau masyarakat politik. Salah satu ciri khas pendekatan perilaku ialah pandangannya tentang masyarakat. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.

### Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem hukum, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor; seperti keluarga, agama, kelompok pergaulan dan sekolah.

---

<sup>8</sup> Jalaludin Rakhmat, *Opcit*, hlm 56

<sup>9</sup> Wasesa, *Opcit*, hlm 14

<sup>10</sup> Efriza, *Opcit*, hlm 126

<sup>11</sup> Cholisin dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan UNY, 2007, hlm 27

- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang memberikan pengaruh terhadap aktor secara langsung ketika hendak melakukan sesuatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

### **Partai Politik**

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa parpol adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang No 31 tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa, “Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum”. Basrowi dkk<sup>13</sup> menyatakan bahwa tujuan partai politik adalah mewujudkan: (a) nasionalisme sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi; (b) kehidupan demokrasi; (c) kesejahteraan masyarakat; dan (d) cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Metode Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan strategi penelitian studi kasus tunggal. Kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan penjelasan atas gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>14</sup> Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai. Penelitian Survai yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Efriza. *Political Explore*, 2013, hlm 217

<sup>13</sup> Basrowi dkk, *Opcit*, hlm 50

<sup>14</sup> Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 42

<sup>15</sup> Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm 33

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masuk dalam wilayah Kabupaten Wonogiri, yang telah mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum 2014. Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan, dimana total jumlah pemilih sebesar 904.133 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah responden adalah 100 orang, yang diambil dari Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdapat di Kabupaten Wonogiri.

### **Hasil Temuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai calon legislatif yang melakukan perilaku pindah partai politik di Kabupaten Wonogiri pada pemilu legislatif 2014. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa mayoritas masyarakat mengetahui fenomena calon legislatif pindah partai politik 2014 di Kabupaten Wonogiri melalui media massa. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi serta semakin gencarnya media massa dalam menyajikan informasi politik menjelang pemilihan umum 2014. Mengenai spesifikasi nama calon legislatif yang melakukan perpindahan partai politik sebagian besar masyarakat mengaku mengetahui, dan 5% mengaku sangat mengetahui. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap politik cukup besar. Hal tersebut terbukti dengan jawaban mayoritas responden yang mengaku mengetahui riwayat karir calon legislatif pindah partai politik tersebut.

Sebagian besar masyarakat mempunyai anggapan bahwa motif utama calon legislatif di Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum legislatif adalah motif pribadi, artinya keputusan berpindah partai politik tersebut adalah untuk mewujudkan kepentingan pribadi yaitu untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri. Selain itu sebagian besar masyarakat mempunyai persepsi negatif terhadap calon legislatif yang melakukan pindah partai politik. Penulis berasumsi bahwa terbentuknya persepsi tersebut tidak terlepas dari perubahan iklim sosial-politik di Indonesia dewasa, hal ini sesuai dengan pendapat dari Adnan Nursal dalam Marzuki Ali<sup>16</sup> bahwa perubahan lingkungan politik mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemahaman para pemilih

---

<sup>16</sup> Marzuki Ali, Opcit

terhadap partai politik. Seperti kita ketahui bahwa dunia politik Indonesia begitu dinamis, banyak pergolakan politik yang terjadi baik di dalam internal partai politik maupun antarpartai. Dalam proses itulah masyarakat melihat dan mendengar sehingga terbentuklah persepsi, dalam tahap ini disebut *selective attention* yaitu dimana seseorang akan mempersepsikan perhatiannya, dan seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa faktanya masyarakat menganggap bahwa perilaku perpindahan partai politik adalah sesuatu yang negatif.

Berdasarkan penelitian ini diketahui fakta bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebesar 55% menyatakan tidak mendukung calon legislatif yang melakukan perpindahan politik pada masa menjelang pemilihan legislatif pada tahun 2014. Bahkan 12% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka sangat tidak mendukung pencalegan politisi-politisi tersebut. Selain itu sebagian besar masyarakat yang terlibat sebagai responden pun mengaku bahwa mereka mempunyai kepercayaan pada tingkatan 0% sampai dengan 25% saja terhadap calon legislatif pindah partai politik tersebut.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat yaitu sebesar 63% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa sebelum memilih pada pemilihan legislatif mereka melakukan pertimbangan sebelumnya. Setelah dilakukan tabulasi silang sebagian besar masyarakat yang melakukan pertimbangan adalah yang mengaku memilih calon legislatif pindah partai politik. Selain itu dalam penelitian ini juga mengungkap bahwa mayoritas responden menyatakan tidak memilih calon legislatif yang melakukan pindah partai politik pada pemilihan legislatif pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa citra calon legislatif yang melakukan perpindahan partai tersebut buruk dimata masyarakat. Masyarakat bukan hanya tidak mendukung pencalonan caleg pindah partai namun pada kenyataannya masyarakat juga memutuskan untuk tidak memilih anggota legislatif tersebut. Sehingga hal ini juga sesuai dengan hasil perolehan suara dari 13 nama yang melakukan perpindahan partai politik yang notabene seluruhnya tidak berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Penulis berasumsi bahwa dewasa ini masyarakat semakin kritis terhadap politik terlebih terhadap politisi-politisi di Indonesia. Kesadaran politik ini diharapkan akan semakin tumbuh seiring berjalannya demokrasi di era reformasi ini.



## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Politisi Pindah Partai Politik oleh Calon Legislatif 2014 di Kabupaten Wonogiri”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonogiri mempunyai persepsi bahwa perilaku pindah partai yang dilakukan oleh calon legislatif di Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum legislatif 2014 adalah sesuatu yang negatif. Hal tersebut dinyatakan oleh 47 orang responden atau 47 % dari 100 orang responden yang terlibat. Bahkan 25 % reponden lain menyatakan mereka ragu-ragu. Selain itu mayoritas masyarakat (38 orang atau 38 % dari seluruh responden) juga menilai bahwa latar belakang atau motif dari calon legislatif berpindah partai politik semata-mata karena motif pribadi, di antaranya motif untuk mendapatkan uang dan menduduki kekuasaan. Sehingga masyarakat berpikir bahwa politisi yang mempunyai indikasi perilaku tersebut tidak pantas untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri pada periode 2014-2019, terbukti dengan banyaknya yaitu 40% dari keseluruhan masyarakat yang menyatakan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat konsisten terhadap persepsi bahwa perilaku pindah partai adalah sesuatu yang negatif dari sudut pandang mereka.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 55% dari keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka tidak mendukung calon legislatif pindah partai. Hal itu juga terlihat pada hasil temuan bahwa responden sebanyak 44 orang atau 44% mempunyai tingkat kepercayaan yang paling rendah, yaitu pada kisaran 0% sampai dengan 25% terhadap calon legislatif di Kabupaten Wonogiri yang melakukan perpindahan partai politik. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari sebagian besar responden rendah terbukti dengan tidak diberikannya dukungan dan tingkat kepercayaan yang dimiliki.
3. Masyarakat menjadikan perilaku perpindahan partai politik oleh Calon Legislatif Kabupaten Wonogiri sebagai pertimbangan dalam memilih dan diketahui bahwa pada

pemilihan umum legislatif 2014 mayoritas masyarakat membuat keputusan untuk tidak memilih anggota legislatif pindah. Hal itu dinyatakan oleh 71 orang atau 71% responden. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat semakin kritis dalam menanggapi fenomena perpindahan partai politik oleh calon legislatif Kabupaten Wonogiri.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tentang pembahasan tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Politisi Pindah Partai Politik oleh Calon Legislatif 2014 di Kabupaten Wonogiri”, maka peneliti memberikan saran - saran seperti berikut :

1. Setiap politisi yang ingin maju sebagai calon legislatif perlu mempertimbangkan dengan lebih seksama sebelum membuat keputusan politik, terutama mengenai berpindah partai politik tanpa alasan yang logis. Karena pada dasarnya masyarakat telah mulai memiliki kesadaran politik dan terbukti bahwa masyarakat berpandangan bahwa berpindah partai politik adalah sesuatu yang negatif, sehingga perilaku ini sebaiknya dihindari.
2. Dengan ditemukannya fakta bahwa kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif yang melakukan pindah partai maka calon legislatif sebaiknya lebih memberikan citra positif jika memang terpaksa harus berpindah partai demi kepentingan rakyat. Namun apabila hanya untuk mengejar keuntungan pribadi, maka tindakan ini sebaiknya dihindari, karena pada dasarnya kepercayaan masyarakat mulai terkikis dengan adanya fenomena ini. Kepercayaan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diperjuangkan. Sehingga setiap politisi baik calon anggota legislatif atau pun aktor politik lain mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi seperti yang terdapat di UUD 1945.
3. Jika mempertimbangkan hasil dari penelitian ini dimana masyarakat menyatakan tidak memilih calon legislatif 2014, maka setiap politisi khususnya calon legislatif yang melakukan pindah partai harus benar-benar memikirkan bagaimana mendapatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat sebagai konstituen memberikan suara pada pemilihan umum legislatif. Dengan semakin

kritisnya masyarakat saat ini mestinya calon legislatif juga harus mengimbangi dengan kualitas yang memadai sehingga bukan hanya simpati dari masyarakat yang di dapat namun juga empati. Selain itu perlu dipikirkan apakah perpindahan partai politik itu benar-benar atas nama rakyat atau hanya untuk keuntungan individual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan dan Dyah Ratih. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media
- Ali, Marzuki. (2013). *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Jakarta: Expose (PT Mizan Publika)
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi, dkk. (2012). *Sosiologi Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Chumaidy, Chozin. (2006). *Etika Politik & Esensi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu
- Cholisin dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Yogyakarta: Unit Percetakan dan Penerbitan UNY
- Efriza. (2012). *Political Explore:Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo
- Nasution, Noviantika. (2006). *Bobolnya Kandang Banteng*. Jakarta : Suara Bebas
- Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif :Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rakhmat, Jalaluddin. (2012). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sadli, Saparinah. (1987). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Thesis
- Severin, Werner J. & James W. Tankard Jr. (2011). *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sitepu, P. Anthonius. (2012). *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*: Gradien Media
- Walgito, Bimo. (1992). *Pengantar Psikologi Umum Edisi 3*. Yogyakarta. ANDI
- Walgito, Bimo. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wasesa, Silih Agung. (2006). *Strategi Public Relations*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Winaryo. (2004). *Self Empowerment, Persepsi, Paradigma dan Motivasi Salesman*. Jakarta: Grasindo